

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Dinas Bupati Kuningan merupakan bangunan pemerintahan kolonial yang masih bertahan di Kabupaten Kuningan dan memiliki nilai historis serta arsitektural yang penting. Bangunan ini tidak hanya berfungsi sebagai kediaman resmi bupati, tetapi juga mencerminkan struktur pemerintahan kolonial Hindia Belanda di tingkat kabupaten yang mulai diperkuat sejak akhir abad ke-19 di wilayah Jawa, khususnya kawasan Priangan. Dalam sistem *Binnenlands Bestuur*, bupati ditempatkan sebagai bagian integral dari struktur birokrasi kolonial yang berperan sebagai penghubung antara pemerintah kolonial Belanda dan masyarakat pribumi. Bupati era kolonial memiliki tugas tersendiri yang telah diatur oleh pemerintahan Hindia Belanda, sebagaimana yang tertulis dalam peraturan tahun 1867 yang mengatur tugas bupati dan wedana dalam ruang lingkup pemerintahan.¹

Sistem ini memfasilitasi pembentukan infrastruktur pemerintahan daerah, termasuk rumah dinas bupati, yang selain berfungsi sebagai ruang domestik pejabat, juga menjadi simbol kekuasaan kolonial yang diwakili oleh elite lokal. Dengan demikian, rumah dinas bupati memiliki fungsi ganda, yakni sebagai tempat tinggal pejabat sekaligus sebagai simbol legitimasi

¹ Tendi, *Bertahan Melawan Terpaan: Agama Jawa Sunda Pada Masa Kepemimpinan Tejabuana*, (Malang: Ahlimedia Book, 2021), hlm. 39.

kekuasaan politik kolonial di tingkat daerah. Dari perspektif arsitektur, bangunan pemerintahan kolonial di Jawa pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 menunjukkan proses adaptasi terhadap kondisi iklim tropis. Arsitektur kolonial tidak sepenuhnya mengadopsi gaya Eropa secara utuh, melainkan mengalami transformasi menjadi arsitektur Indische melalui penyesuaian elemen-elemen seperti serambi lebar, ventilasi silang, dan penggunaan material lokal. Adaptasi ini menggambarkan interaksi antara kebutuhan administratif kolonial dengan kondisi lingkungan tropis di Hindia Belanda.²

Kajian mengenai arsitektur kolonial di Indonesia telah banyak dilakukan, khususnya pada bangunan pemerintahan dan kawasan perkotaan di pusat-pusat kolonial seperti Batavia, Semarang, dan Bandung. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada tipologi bangunan pemerintahan skala besar, evolusi gaya arsitektur kolonial, serta transformasi kota kolonial sebagai pusat administrasi. Selain itu, beberapa studi juga menyoroti adaptasi arsitektur kolonial terhadap iklim tropis dan proses pembentukan gaya Indische sebagai hasil akulturasi antara arsitektur Eropa dan lokal. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengkaji bangunan pemerintahan tingkat kabupaten di wilayah Priangan Timur, terutama di Kuningan, masih relatif terbatas. Penelitian yang ada belum banyak mengelaborasi transformasi bentuk, tata ruang, dan karakter arsitektur bangunan

² F. de Haan, Priangan: De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811 (Batavia: Bataviaasch Genootschap, 1910–1912), hlm. 214–218 (struktur regentschap dan pemerintahan Priangan).

pemerintahan di tingkat lokal dalam konteks sistem administrasi kolonial. Selain itu, hubungan antara perubahan struktur pemerintahan kolonial di tingkat kabupaten dengan pembentukan dan perkembangan arsitektur Rumah Dinas Bupati juga belum dianalisis secara mendalam. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang signifikan, yaitu minimnya kajian yang secara langsung menghubungkan dinamika sistem pemerintahan kolonial tingkat kabupaten dengan transformasi arsitektur Rumah Dinas Bupati sebagai bagian dari infrastruktur kekuasaan kolonial di wilayah Priangan Timur. Pendekatan ini penting untuk memahami tidak hanya aspek fisik bangunan, tetapi juga makna sosial-politik yang melekat pada ruang pemerintahan kolonial di tingkat lokal. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk mengkaji Rumah Dinas Bupati Kuningan tidak hanya sebagai bangunan bersejarah, tetapi juga sebagai produk arsitektur kolonial yang mengalami proses adaptasi lokal serta merepresentasikan dinamika hubungan kekuasaan antara pemerintah kolonial dan elite lokal di wilayah Priangan Timur pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20.³

Selain itu, belum terdapat kajian yang secara spesifik menghubungkan perkembangan sistem pemerintahan kolonial di Kuningan dengan transformasi arsitektur Rumah Dinas Bupati dalam rentang akhir abad ke-19 hingga menjelang berakhirnya

³ C. Fasseur, *The Politics of Colonial Exploitation: Java, the Dutch, and the Cultivation System* (Ithaca: Cornell University Press, 1992), hlm. 85–92 (sistem Binnenlands Bestuur dan posisi bupati dalam struktur kolonial).

kekuasaan kolonial pada tahun 1942. Kekosongan kajian tersebut menunjukkan adanya research gap yang penting dalam memahami hubungan antara kekuasaan kolonial, elite lokal, dan pembentukan ruang pemerintahan di tingkat kabupaten.⁴

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji Rumah Dinas Bupati Kuningan tidak hanya sebagai bangunan bersejarah, tetapi juga sebagai produk arsitektur kolonial yang mengalami proses adaptasi lokal serta mencerminkan dinamika sosial-politik pemerintahan kolonial di wilayah Priangan.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah pendirian Rumah Dinas Bupati Kuningan tahun 1892 – 1942?
2. Bagaimana perkembangan bentuk dan elemen arsitektur Rumah Dinas Bupati Kuningan tahun 1892–1942?
3. Bagaimana pengaruh kolonial dan budaya lokal dalam perkembangan arsitektur bangunan?

C. Tujuan Penelitian

1. Merekonstruksi sejarah berdirinya Rumah Dinas Bupati Kuningan pada masa Kolonial

⁴ Abidin Kusno, *Behind the Postcolonial: Architecture, Urban Space and Political Cultures in Indonesia* (London: Routledge, 2000), hlm. 35–42.

⁵ Handinoto dan Samuel Hartono, “Arsitektur Transisi di Nusantara dari Akhir Abad 19 ke Awal Abad 20 (Studi Kasus Komplek Bangunan Militer di Jawa pada Peralihan Abad 19 ke 20),” *DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment)* Vol. 34, No. 2 (2006), hlm. 81–92,

2. Mendeskripsikan karakteristik arsitektur Rumah Dinas Bupati Kuningan Tahun 1892–1942.
3. Menganalisis pengaruh arsitektur kolonial dan budaya lokal terhadap perkembangan arsitektur Rumah Dinas Bupati Kuningan Tahun 1892 –1942.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Rumah Dinas Bupati Kuningan yang terletak di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada kedudukan bangunan sebagai salah satu peninggalan sejarah yang memiliki fungsi penting dalam sistem pemerintahan daerah. Selain berfungsi sebagai kediaman resmi bupati, bangunan ini juga menjadi bagian dari kompleks pemerintahan yang mencerminkan perkembangan arsitektur pada masa kolonial.

Ruang lingkup temporal penelitian dibatasi pada periode akhir abad ke 19 –1942. Akhir abad ke -19 dipilih sebagai titik awal penelitian karena merupakan periode pembangunan Rumah Dinas Bupati Kuningan. Sementara itu, tahun 1942 dijadikan batas akhir penelitian karena berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda akibat masuknya Jepang ke Indonesia, yang sekaligus menandai berakhirnya pengaruh administrasi kolonial Belanda dalam perkembangan bangunan pemerintahan di daerah. Adapun ruang lingkup kajian difokuskan pada perkembangan arsitektur Rumah Dinas Bupati Kuningan selama periode tersebut. Kajian meliputi sejarah berdirinya bangunan, karakteristik arsitektur, tata ruang dan fungsi ruang, serta perubahan elemen-elemen arsitektural yang

terjadi dari akhir abad ke-19 hingga 1942. Analisis dilakukan terhadap bentuk bangunan, struktur atap, sistem bukaan, penggunaan material, elemen dekoratif, dan tata ruang untuk mengidentifikasi perkembangan arsitektur yang terjadi pada bangunan.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan melalui pendekatan sejarah arsitektur dengan membandingkan kondisi bangunan pada berbagai periode berdasarkan data arsip, dokumentasi visual, literatur, serta hasil observasi lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak membahas aspek teknis konstruksi secara mendalam maupun perkembangan bangunan setelah tahun 1942, melainkan berfokus pada perkembangan arsitektur bangunan dalam konteks sejarah pemerintahan dan budaya lokal Kabupaten Kuningan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian tersebut penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi serta manfaat, kegunaan dalam penelitian ini ditinjau dari dua aspek yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sejarah lokal, khususnya yang berkaitan dengan sejarah arsitektur dan perkembangan pemerintahan daerah pada masa kolonial di Kabupaten Kuningan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai interaksi antara budaya lokal dan pengaruh kolonial yang tercermin dalam perkembangan arsitektur bangunan pemerintahan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian

selanjutnya yang membahas sejarah bangunan bersejarah, arsitektur kolonial, maupun perkembangan budaya masyarakat lokal.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan mengenai sejarah perkembangan arsitektur Rumah Dinas Bupati Kuningan sebagai salah satu bangunan bersejarah di Kabupaten Kuningan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat sebagai sumber informasi mengenai sejarah lokal dan warisan budaya daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pendukung dalam upaya pelestarian bangunan bersejarah serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga warisan budaya yang memiliki nilai historis bagi perkembangan Kabupaten Kuningan.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan judul penelitian mengenai sejarah perkembangan arsitektur Rumah Dinas Bupati Kuningan tahun 1892–1942, penulis melakukan kajian terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dalam bidang arsitektur kolonial, akulturasi budaya, serta studi ruang dan simbolisme bangunan. Tinjauan pustaka ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan hasil-hasil penelitian sebelumnya, tetapi juga untuk menganalisis pendekatan teori, metode, temuan, serta keterbatasan yang ada, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan kerangka dan posisi penelitian ini.

1. Ida Istiqomah skripsi ***“Akulturasi Budaya pada Arsitektur Langgar Dhuwur Tegal”*** IAIN Purwokerto, Prodi Sejarah Peradaban Islam 2021, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif budaya dalam memahami arsitektur sebagai produk akulturasi. Metode yang diterapkan adalah analisis deskriptif-interpretatif terhadap elemen fisik bangunan seperti atap, dinding, dan ornamen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arsitektur Langgar Dhuwur tidak hanya merepresentasikan bentuk fisik, tetapi juga mengandung nilai simbolik yang lahir dari pertemuan budaya Jawa, Melayu, dan Arab. Bangunan tersebut dipahami sebagai media representasi identitas sosial dan religius masyarakat. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam fokus objek kajian karena lebih menitikberatkan pada bangunan keagamaan dan belum mengkaji bangunan pemerintahan sebagai ruang representasi kekuasaan. Selain itu, konteks kolonial tidak menjadi fokus analisis utama. Jika dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat kesamaan dalam pendekatan akulturasi arsitektur, namun penelitian ini memperluas cakupan ke ranah bangunan pemerintahan kolonial yang memiliki fungsi politik-administratif, bukan semata-mata religius-kultural.⁶
2. Kamelia Gumilani Priadi skripsi yang berjudul ***“Interior Gedung Paseban Tri Panca Tunggal Sebagai Simbolisasi***

⁶ Ida Istiqomah, skripsi *“Akulturasi Budaya Pada Arsitektur Langgar Dhuwur Tegal”* (Skripsi Tidak Diterbitkan, Prodi Sejarah Peradaban Islam, 2021).

Pandangan Hidup Kelompok Penghayat Agama Djawa Sunda” Institut Teknologi Bandung (ITB), prodi Desain Interior Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan fokus pada analisis ruang interior dan simbolisme budaya. Metode yang diterapkan meliputi observasi visual, interpretasi elemen ruang, dan kajian makna simbolik. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa tata ruang dan elemen interior bangunan merepresentasikan sistem nilai kepercayaan Agama Djawa Sunda (ADS), sehingga ruang tidak hanya berfungsi secara praktis, tetapi juga memiliki makna ideologis. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus yang sangat khusus pada bangunan komunitas kepercayaan, sehingga belum membahas hubungan antara ruang dengan struktur kekuasaan formal seperti pemerintahan kolonial. Dalam konteks penelitian ini, terdapat kesamaan pendekatan dalam memandang ruang sebagai representasi makna, namun berbeda dalam fungsi bangunan. Penelitian ini memusatkan perhatian pada Rumah Dinas Bupati sebagai simbol kekuasaan kolonial dan elite lokal dalam sistem Binnenlands Bestuur.⁷

3. Ardhiana Muhsin et al. (2023) Reka Kasa : Jurnal yang berjudul ***“Identifikasi Gaya Arsitektur Indische Empire Style pada Bangunan Rumah Tinggal Wangsadikrama***

⁷ Priadi Kamelia Gumilani Priadi *Interior Gedung Paseban Tri Panca Tunggal sebagai Simbolisasi Pandangan Hidup Kelompok Penghayat Agama Djawa Sunda*. (skripsi tidak diterbitkan. Bandung: Fakultas Seni Rupa ITB) (2008).

Kota Cimahi” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode observasi lapangan dan studi literatur mengenai gaya arsitektur kolonial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bangunan rumah tinggal Wangsadikrama di Cimahi memiliki karakter gaya Indische Empire Style, yang terlihat dari fasad simetris, komposisi ruang formal, serta adaptasi terhadap iklim tropis. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berhenti pada identifikasi gaya arsitektur tanpa mengaitkannya dengan konteks historis perkembangan fungsi bangunan maupun dinamika sosial-politik yang melatarbelakanginya. Dalam konteks ini, penelitian memiliki kesamaan dalam analisis visual arsitektur kolonial, tetapi memperluasnya dengan pendekatan historis yang menelaah perkembangan arsitektur dalam rentang waktu 1892–1942 serta keterkaitannya dengan sistem pemerintahan kolonial.⁸

4. Harisun & Quraisy (2017) jurnal Simposium Nasional RAPI XVI yang berjudul ***“Arsitektur Kolonial Pada Bangunan Rumah Gubernur Jenderal VOC Di Benteng Oranje Ternate”*** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-historis dengan metode analisis arsip, dokumentasi, dan studi tipologi arsitektur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bangunan kolonial tidak

⁸ Ardhiana Muhsin et al. "Identifikasi Gaya Arsitektur Indische Empire Style pada Bangunan Rumah Tinggal Wangsadikrama Kota Cimahi." *Reka Karsa: Jurnal Arsitektur* 11.3 (2023): 1-14.

hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan administrasi, tetapi juga sebagai simbol dominasi kekuasaan kolonial dalam konteks wilayah strategis. Kelemahan penelitian ini terletak pada fokus geografis yang berbeda, yaitu di Ternate, sehingga tidak membahas dinamika adaptasi arsitektur kolonial di tingkat kabupaten di Jawa, khususnya dalam hubungan dengan elite lokal. Penelitian ini relevan dalam melihat bangunan kolonial sebagai simbol kekuasaan, namun mempersempit fokus pada Rumah Dinas Bupati di Kuningan sebagai representasi kekuasaan kolonial di tingkat lokal yang lebih mikro.⁹

Hasil Sintesis Kajian dan Posisi Penelitian

Dari berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian arsitektur kolonial telah banyak membahas tiga aspek utama, yaitu: Akulturasi budaya dalam arsitektur, Analisis ruang dan simbolisme bangunan, Identifikasi gaya arsitektur kolonial. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan pada:

1. Fokus objek di bangunan keagamaan atau bangunan elite tertentu,
2. Keterbatasan pada analisis gaya tanpa konteks historis yang mendalam,

⁹ Harisun, Endah, dan Sayyid Quraissy, "Arsitektur Kolonial Pada Bangunan Rumah Gubernur Jendral Voc Di Benteng Oranje Ternate" *Jurnal Simposium Nasional RAPI XVI*, hal.178.

3. Minimnya kajian pada bangunan pemerintahan tingkat kabupaten, Kurangnya integrasi antara aspek arsitektur, sejarah pemerintahan kolonial, dan relasi kekuasaan lokal.

Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi baru dengan mengkaji sejarah perkembangan arsitektur Rumah Dinas Bupati Kuningan (1892–1942) yang tidak hanya dilihat dari aspek bentuk dan gaya, tetapi juga menghubungkan dinamika sistem pemerintahan kolonial (*Binnenlands Bestuur*), peran elite lokal (bupati), serta proses adaptasi arsitektur Indische di wilayah Priangan Timur.

G. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan dua landasan teori, yaitu Arsitektur Indis sebagai konsep arsitektural dan Teori Hibriditas Homi K. Bhabha sebagai kerangka analisis sosial-budaya. Kedua teori ini digunakan untuk memahami perkembangan arsitektur Rumah Dinas Bupati Kuningan pada periode 1892–1942 yang merupakan hasil interaksi antara budaya kolonial dan budaya lokal.

Arsitektur Indis dipahami sebagai gaya arsitektur kolonial yang lahir dari proses adaptasi arsitektur Eropa terhadap iklim tropis, material lokal, serta kebiasaan masyarakat di Hindia Belanda. Menurut kajian Djoko Sukiman dan Bambang Purwanto, Arsitektur Indis merupakan bentuk arsitektur hibrida yang tidak sepenuhnya Eropa, tetapi juga tidak sepenuhnya lokal, melainkan hasil pertemuan keduanya. Dalam penelitian ini, Arsitektur Indis digunakan untuk mengidentifikasi karakter fisik bangunan, seperti

fasad, atap, sistem bukaan, tata ruang, material, serta unsur adaptasi lokal.¹⁰

Sementara itu, Teori Hibriditas Homi K. Bhabha digunakan untuk menjelaskan proses sosial-budaya di balik terbentuknya arsitektur tersebut. Dalam perspektif ini, kolonialisme tidak menghasilkan dominasi budaya yang tunggal, tetapi menciptakan ruang pertemuan (third space) yang melahirkan bentuk budaya baru melalui negosiasi antara kolonial dan lokal. Dalam konteks penelitian ini, Rumah Dinas Bupati Kuningan dipahami sebagai ruang hibrida yang merepresentasikan kekuasaan kolonial sekaligus adaptasi budaya lokal.¹¹

Dengan demikian, Arsitektur Indis digunakan untuk membaca bentuk fisik bangunan, sedangkan Teori Hibriditas digunakan untuk memahami proses pembentukan makna sosial-budaya di balik arsitektur tersebut. Kombinasi kedua teori ini memungkinkan penelitian tidak hanya mengidentifikasi gaya bangunan, tetapi juga menjelaskan hubungan antara kekuasaan kolonial dan budaya lokal dalam perkembangan arsitektur Rumah Dinas Bupati Kuningan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan mengelompokkan teknik, pedoman, dan praktik yang digunakan oleh ilmuwan di bidang tertentu. Oleh karena itu, kajian terhadap metodologi merupakan landasan nasihat dalam melakukan penelitian ini

¹⁰ Djoko Sukiman, *Arsitektur Kolonial di Indonesia: Adaptasi dan Transformasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), hlm. 45–48.

¹¹ Homi K. Bhabha, *The Location of Culture*, (London: Routledge, 1994), hlm. 37–39.

menerapkan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus pada objek penelitian yaitu sejarah perkembangan arsitektur bangunan Rumah Dinas Bupati Kuningan. Dengan metode kualitatif, peneliti dapat mengumpulkan data deskriptif berupa observasi lapangan, narasi lisan, dokumentasi visual, dan analisis historis yang kemudian diinterpretasikan secara kritis.¹²

Penelitian ini menggunakan metode sejarah (*Historical Method*). Metode sejarah relevan untuk objek penelitian karena bangunan tersebut memiliki latar waktu yang spesifik, berfungsi sebagai produk kekuasaan kolonial dan tradisi lokal, serta mengalami transformasi fisik dan sosial pada akhir abad ke-19-1942. Metode sejarah memungkinkan peneliti merekonstruksi perjalanan bangunan dari waktu ke waktu dengan memperhatikan aspek manusia (aktor-penggerak), ruang (lokasi, desain, relasi lingkungan) dan waktu (rentang pembangunan, penggunaan dan perubahan). Metode ini digunakan agar hasil penelitian yang diperoleh tidak bersifat deskriptif tanpa dasar, melainkan berlandaskan data empiris sehingga temuan yang dihasilkan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode sejarah terdiri dari empat tahapan, yaitu: heuristik atau pengumpulan data, verifikasi atau kritik sejarah, interpretasi atau penafsiran sumber, dan historiografi atau penulisan sejarah.¹³

¹² Muhamad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1, (2021), hal. 34.

¹³ Aditia Muara Padiatra, *Ilmu sejarah: Metode dan Praktik*, Gersik : JSI Press, (2020). hal.35-36.

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber Sejarah)

Heuristik merupakan tahap awal dalam metode penelitian sejarah yang berfungsi sebagai proses penelusuran dan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan objek penelitian. Tahap ini menjadi dasar penting dalam rekonstruksi suatu peristiwa atau objek kajian, karena seluruh analisis sejarah bertumpu pada ketersediaan dan kualitas sumber yang diperoleh.

Dalam penelitian sejarah, sumber dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah data otentik yang diperoleh langsung dari peristiwa atau pihak yang terlibat secara langsung dalam objek kajian, sedangkan sumber sekunder merupakan data yang berasal dari pihak lain yang tidak mengalami peristiwa secara langsung, seperti buku, jurnal, skripsi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.¹⁴

Adapun dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan meliputi arsip dokumen pemerintah kolonial, foto-foto arsip, peta historis, serta dokumentasi visual yang berkaitan dengan Rumah Dinas Bupati Kuningan. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk menelusuri kondisi awal, perkembangan bentuk, serta perubahan fungsi bangunan pada periode penelitian.

Selain studi arsip, penelitian ini juga menggunakan teknik observasi lapangan untuk memperoleh data kondisi aktual bangunan. Observasi dilakukan dengan mengamati elemen-elemen arsitektural seperti fasad, struktur atap, tata ruang, dan elemen pendukung lainnya yang masih tersisa.

¹⁴ Anwar Sanusi, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Cirebon: Syekh Nurjati Press, 2013), hlm. 137.

Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara sebagai sumber data tambahan. Wawancara dilakukan kepada pihak yang memiliki pengetahuan terkait sejarah dan perkembangan bangunan, seperti pihak pengelola, pemerintah daerah, serta informan yang memahami sejarah lokal. Data hasil wawancara digunakan untuk melengkapi informasi arsip dan observasi, terutama dalam menjelaskan perubahan fungsi dan perkembangan historis bangunan yang tidak terdokumentasi secara tertulis.

Sementara itu, sumber sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas arsitektur kolonial, Arsitektur Indis, serta sejarah pemerintahan kolonial di Indonesia. Sumber-sumber ini digunakan sebagai landasan teoritis dan pembandingan dalam proses analisis data.¹⁵

Adapun dalam penelitian ini sumber primer yang digunakan yaitu arsip dokumen pemerintah kolonial, foto arsip, Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Teknik observasi yaitu dengan melakukan wawancara.

Adapun Wawancara dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dari penyusunan dan penggabungan pertanyaan yang relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan proses tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai sejarah dan perkembangan arsitektur Bangunan Rumah Dinas Bupati Kuningan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara

¹⁵ Nina Herlina, *Metode Sejarah*, Bandung: Satya Historika, (2008), hal. 115.

dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu dengan ibu Funny Amalia Murtilam sebagai staf di bidang kebudayaan, dan bapak Rusim selaku kasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuningan dan bapak dodo suwondo sebagai budayawan kuningan dan tokoh setempat serta ada ibu fauziah sebagai tim ahli cagar budaya (TACB).

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Pada tahap ini selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau kritik sumber untuk menilai tingkat autentisitas serta kredibilitasnya. Tahap ini mencakup dua bentuk kritik, yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal diarahkan pada penelaahan isi sumber, termasuk kualitas informasi yang disajikan, kompetensi penulis, serta kedekatannya dengan peristiwa yang dikisahkan.¹⁶ Adapun kritik eksternal menitikberatkan pada pengujian keaslian sumber melalui pemeriksaan berbagai aspek fisik dan historis, seperti waktu penerbitan, jenis material yang digunakan, status sumber sebagai naskah asli atau salinan, serta karakteristik penulisan dan unsur fisik lainnya.¹⁷

3. Interpretasi (Penafsiran Sejarah)

Tahap interpretasi merupakan proses penafsiran terhadap data sejarah yang telah melalui verifikasi sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti mulai mengaitkan berbagai fakta yang ditemukan untuk mengungkap makna, hubungan kausalitas, serta konteks sosial, budaya, dan politik yang melatarbelakangi suatu peristiwa.

¹⁶ Wasino, Endah Sri Hartatik, *Metode Penelitian Sejarah: dari Riset hingga Penulisan*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), hlm. 71.

¹⁷ Aditia Muara Padiatra, Op. Cit. hal. 35.

Interpretasi tidak berhenti pada penyusunan fakta secara kronologis, melainkan juga berupaya memahami makna yang tersembunyi di balik peristiwa serta dinamika yang mempengaruhi terbentuknya peristiwa tersebut.¹⁸

4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Tahap historiografi dipahami sebagai proses penyusunan kembali peristiwa masa lalu berdasarkan sumber-sumber yang telah dikumpulkan dan diverifikasi. Tahapan ini dapat dimaknai secara ringkas sebagai kegiatan penulisan sejarah, yaitu upaya menyajikan hasil rekonstruksi ilmiah terhadap suatu peristiwa. Historiografi merupakan tahap puncak dalam penelitian sejarah, karena pada fase inilah keseluruhan temuan penelitian dirumuskan secara sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai karya sejarah.¹⁹

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi untuk mempermudah pemahaman. Dalam pembahasan skripsi ini akan dibagi ke dalam lima bab yang disusun secara kronologis dan saling berkaitan. Penulisan ini akan disusun atas pembagian bab dan sub bab sebagai berikut:

BAB I ini menghimpun beberapa hal mengenai pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

¹⁸ Wulan Juliani Sukmana, "Metode Penelitian Sejarah," *Seri Publikasi Pembelajaran*, Vol. 2, No. 2, (2021), hal. 3.

¹⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, (2018), hal. 69–80.

BAB II menyajikan gambaran umum Kabupaten Kuningan sebagai konteks historis dan geografis bagi keberadaan bangunan yang diteliti. Pembahasan meliputi kondisi fisik wilayah, dinamika pemerintahan daerah pada masa kolonial, serta aspek sosial budaya masyarakat Kuningan pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Uraian ini diperlukan untuk memahami lingkungan dan situasi historis yang turut memengaruhi arah perkembangan arsitektur di wilayah tersebut.

BAB III menguraikan pendirian arsitektur Rumah Dinas Bupati Kuningan tahun 1892. hingga 1942 bab ini membahas perubahan bentuk bangunan, penyesuaian fungsi ruang, dan transformasi elemen arsitektural yang terjadi dalam rentang waktu tersebut. Penjelasan diarahkan untuk menunjukkan bagaimana kebijakan kolonial, kebutuhan administratif, dan dinamika lokal memengaruhi evolusi arsitektur bangunan.

BAB IV berisi analisis terhadap karakteristik arsitektur bangunan yang meliputi bentuk bangunan, tata ruang, fungsi ruang, elemen arsitektural, pengaruh arsitektur kolonial dan lokal, serta makna historis bangunan dalam perkembangan pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan.

BAB V memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum temuan utama terkait perkembangan arsitektur Rumah Dinas Bupati Kuningan, sedangkan saran diarahkan bagi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan sejarah arsitektur kolonial maupun pelestarian bangunan bersejarah di wilayah Kuningan.